

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



KATA PENGANTAR

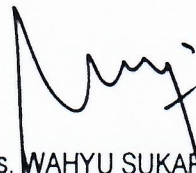
Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang Tahun 2018. LKjIP tersebut disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan dalam Kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Visi, Misi dan Rencana Kinerja tahun 2018 dan umpan balik dalam Perbaikan Perencanaan dan Peningkatan Kinerja serta mendorong Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (good governance).

Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Pematang, Januari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEMATANG



Drs. WAHYU SUKARNO AP, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19700621 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Aspek Strategis	3
1.5. Issue Strategis	6
1.6. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kinerja	10
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	18
3.3. Permasalahan dan Solusi	21
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	22
3.5. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang Tahun 2017 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja ini menjadi alat kendali untuk upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja, dan sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang pada pasal 3 ayat (18) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub pemadam kebakaran.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang.

1) TUGAS

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan

2) FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

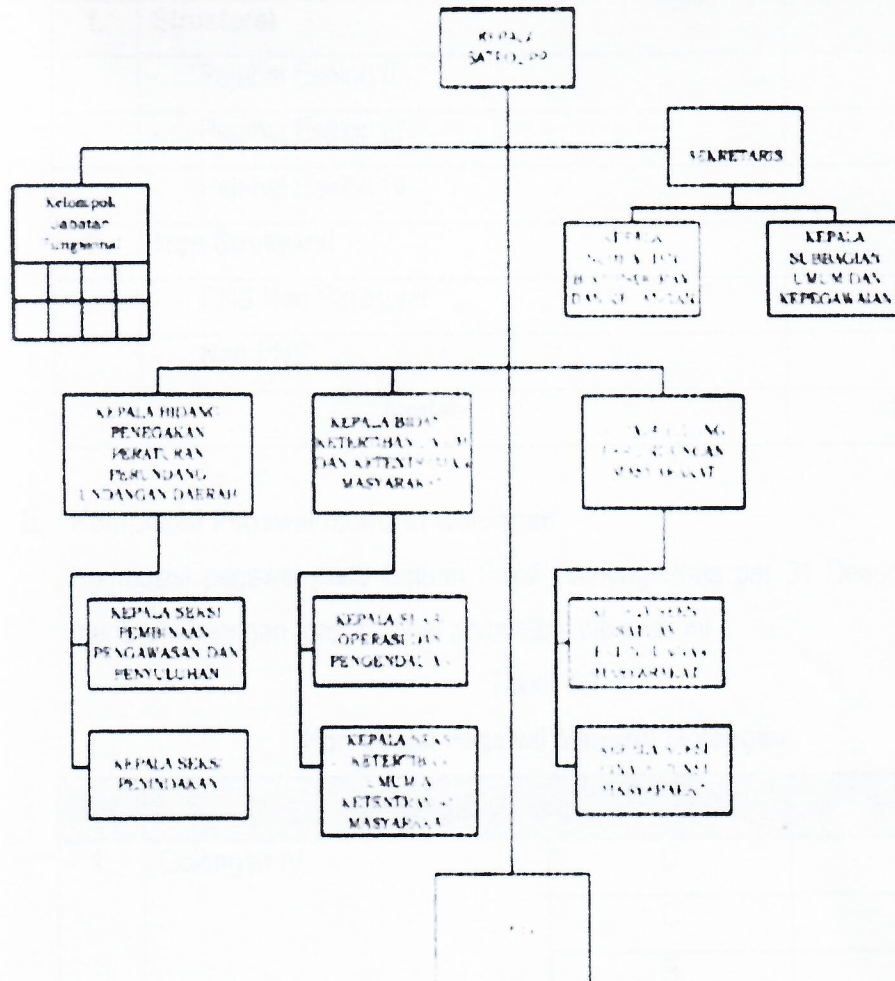
- a) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, bahwa Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati pemalang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris, yang membawahi dengan 2 (dua) sub bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penindakan;
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
5. Kepala Bidang perlindungan Masyarakat, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Satuan Perindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
6. Kepala UPT Pemadam Kebakaran;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang



1.4. ASPEK STRATEGI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang memiliki tiga aspek strategi yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

1. Sumber Daya Manusia .

a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2018 menurut Jabatan nya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	
	- Pejabat Eselon II	1
	- Pejabat Eselon III	4
	- Pejabat Eselon IV	6
2.	Non Struktural	
	- PNS Non Struktural	60
	- Non PNS	92
Jumlah		163

b. Komposisi Pegawai menurut Golongan

Komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2018 menurut Golongan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang		Jumlah
1.	Golongan IV	D	-
		C	1
		B	2
		A	1
2.	Golongan III	D	9
		C	1
		B	9
		A	3
3.	Golongan II	D	6
		C	29
		B	4
		A	2
4.	Golongan I	D	-
		C	3
		B	-
5.	Non PNS	-	92
Jumlah			163

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	
	- Pejabat Eselon II	1
	- Pejabat Eselon III	4
	- Pejabat Eselon IV	6
2.	Non Struktural	
	- PNS Non Struktural	60
	- Non PNS	92
Jumlah		163

b. Komposisi Pegawai menurut Golongan

Komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2018 menurut Golongan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang		Jumlah
1.	Golongan IV	D	-
		C	1
		B	2
		A	1
2.	Golongan III	D	9
		C	1
		B	9
		A	3
3.	Golongan II	D	6
		C	29
		B	4
		A	2
4.	Golongan I	D	-
		C	3
		B	-
5.	Non PNS	-	92
Jumlah			163

c. Komposisi Pegawai menurut Pendidikan

Komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2018 menurut Pendidikan, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 1.3
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
		PNS	Non PNS
1.	Lulusan SD	2	-
2.	Lulusan SMP/MTs	3	-
3.	Lulusan SMA/SMK/MA	51	74
4.	Lulusan D3	-	3
5.	Lulusan S1	10	15
6.	Lulusan S2	5	-
Jumlah		71	92

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2018, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung / Kantor Satpol PP	1
2.	Kendaraan Operasional Roda 4	7
3.	Kendaraan Operasional Roda 2	8
4.	Kendaraan Pemadam Kebakaran	4
5.	Kendaraan Operasional untuk Patroli	3

3. Sumber Dana

Dalam rangka mendukung untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat, yang meliputi : sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat, diperlukan anggaran yang memadai. Berikut ini sumber

dana dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut :

Table 1.5
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018

No.	Sumber Dana APBD	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	5.283.803.000,00
	- Belanja Pegawai (Gaji)	5.283.803.000,00
2.	Belanja Langsung	5.525.575.100,00
	- Belanja Pegawai	561.694.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	4.883.782.100,00
	- Belanja Modal	88.099.000,00
	Jumlah	10.809.378.000,00

1.5. ISSUE STRATEGIS

Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan kebakaran di tahun 2018.

Sedangkan permasalahan yang masih muncul dan untuk segera diambil tindakan strategis pada lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi. Tahun 2018 hanya 90% dari pelanggaran yang mampu diselesaikan padahal target SPM untuk cakupan penegakan perda dan perkada adalah 100%. Hal tersebut salah satunya dikarenakan banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Perda maupun Perkada. Selain itu juga karena belum terbentuknya sekretariat PPNS sehingga dalam rangka penyelesaian tugas-tugas penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah belum dapat dilakukan dengan optimal.
- b. Kurangnya kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satpol PP, setahun hanya 720 kali patroli yang dilaksanakan, atau rata-rata hanya 60 kali dalam satu bulan, atau 14 kali dalam 1 minggu (2 kali sehari), sedangkan target SPM untuk patroli adalah 3 kali dalam sehari.
- c. Terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang ada yaitu 71 personil, dibandingkan jumlah penduduknya yang mencapai 1.279.596 jiwa dan luas wilayah 111.530 Ha yang

terbagi dalam 14 kecamatan.

- d. Minimnya sosialisasi tentang kesadaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di masyarakat

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara umum latar belakang organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten pemalang dengan aspek strategis dan permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian singkat Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan analisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

Bab IV Penutup

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang

Lampiran

Pada lampiran ini disajikan pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang periode tahun 2016-2021 yang menjadi kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Lebih lanjut Rentrsa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. PERNYATAAN VISI

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD tersebut Visi Kabupaten Pemalang adalah : **“Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera”**.

2.1.2. PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 tersebut, ditetapkan Misi-misi yang mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran di Kabupaten Pemalang, yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang. Misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahn sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat.

Dari ketujuh misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, adalah misi kelima yaitu **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.**

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, serta sasaran dan kebijakan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja, adalah :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Misi ke 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
a. Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	a. Mendorong anggota Satpol PP Kab. Pemalang dan aparat trantib dalam hal peningkatan kemampuan diri, ketrampilan diri melalui pendidikan formal maupun non formal (diklat)	a. Peningkatan dan pengembangan SDM anggota dan aparat, peningkatan performance dalam rangka peningkatan anggota sesuai dengan peran dan fungsinya.
b. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah / peraturan Kepala Daerah di Kab. Pemalang	b. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas daerah untuk menunjang investasi daerah	b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan - peraturan yang ber-laku	b. Peningkatan pembinaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan lain-lain.
c. Meningkatkan Pelayanan Pemadan Kebakaran			c. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat khususnya pajak/retribusi

		<p>di Kabupaten Pemalang</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Perda /Perkada di Kab. Pemalang</p> <p>d. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Perda / Perkada di Kab. Pemalang serta peningkatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran pene-gakan Perda / Perkada</p> <p>e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penciptaan situasi yang aman, tentram dan tertib</p> <p>f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima</p>	<p>dan pelanggaran Perda lainnya.</p> <p>d. Peningkatan koordinasi aparat keamanan terkait guna ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan masyarakat secara menyeluruh.</p> <p>e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima.</p>
--	--	---	---

Program yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Untuk tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja ada 10 (sepuluh) Program dan 48 (empat puluh delapan) Kegiatan.

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja ini menjadi tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjadi bahan dalam pelaporan kinerja..

Rencana kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan secara maksimal dalam proses manajemen yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kerja juga bermanfaat sebagai patok duga seberapa besar kemampuan pencapaian target yang diinginkan oleh manajemen.

Tabel. 2.2.
Rencana Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	CC
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota	%	15,38
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	64,29
		Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja	Kali	1095
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Personil	110
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Rasio	89,86
		Jumlah kasus konflik sosial	Kasus	2
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	30
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	80
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	unit	4

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang untuk mewujudkan target kinerja dari Renstra SKPD Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	CC	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ opera – sional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f. Penyediaan alat tulis kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i. Penyediaan peralatan rumah tangga j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan k. Penyediaan makanan dan minuman l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan ke luar daerah m. Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan n. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan komputer dan perlengkapannya c. Pengadaan peralatan kerja d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair g. Pemeliharaan rutin/berkala computer dan perlengkapannya 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan mesin/kartu absensi b. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun c. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / kota	15,38	5. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan c. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat d. Pengendalian keamanan lingkungan e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan f. Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan g. Operasi penegakan perda dan perundangan-undangan h. Koordinasi penanganan kasus-kasus pelanggaran perda dan perpu
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	89,86	

		<ul style="list-style-type: none"> i. Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patrol wilayah j. Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat k. Pengamanan Aset Pemda
Persentase patroli siaga keter tiban umum dan ketentraman masyarakat	64,29	<ul style="list-style-type: none"> 6. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal <ul style="list-style-type: none"> a. Penngkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan c. Peningkatan kapaitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah d. Pelaksanaan patroli wilayah e. Peningkatan kemampuan anggota satpol PP 7. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat b. Penyuluhan trantibum dan penega kan perda
Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja	1095	
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	110	
Jumlah kasus konflik sosial	2	<ul style="list-style-type: none"> 9. Program pengembangan wawasan kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan <i>kesadaran masyarakat</i> akan nilai-nilai luhur budaya bangsa b. Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	30	<ul style="list-style-type: none"> 10. Program Darurat Bencana dan Logistik <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan penang gulangan bahaya kebakaran
Tingkat waktu tanggap (respon se time rate)	100	
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	80	
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000	4	

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA SKPD dan DPPA SKPD), yang telah melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh Dana APBD yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD).

Table 2.4.
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	871.253.000,00	15,77
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah	4.654.322.100,00	84,23
	Jumlah	5.525.575.100,00	100

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target dengan menggunakan rumus .

Apabila realisasi semakin tinggi menunjukkan capaian kinerja semakin baik dan apabila realisasi semakin rendah menunjukkan capaian kinerja semakin kurang, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Apabila realisasi semakin tinggi menunjukkan capaian kinerja semakin rendah atau realisasi semakin rendah menunjukkan capaian kinerja semakin tinggi, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

urutan	Rentang Capaian	Katagori capaian
1	≥ 90,10	Sangat baik
2	75,10 - 90,00	Tinggi
3	65,10 - 75	Sedang
4	50,10 - 65,00	Rendah
5	≥ 50,00	Sangat rendah

2. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018. indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tuuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemalang Tahun 2018 secara lengkap ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2016			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	REALISASI	CAPAIAN %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP	CC	CC	CC	?	-	B	-
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan pener-gakaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ kota	13,85	11,11	15,38	12,5	81,27	21,54	58,03
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentra-man masyarakat	64,29	32,14	64,29	42,68	66,39	64,29	66,39

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2018		Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021	
			2016	2017	Target	REALISASI			CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9) = (7) / (8)	
		Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja	660	819	1095	720	65,75	1.095	65,75
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	105	75	110	71	54,64	130	56,92
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	89,83	88,90	89,86	92,63	103	89,95	103
		Jumlah kasus konflik sosial	0	1	2	0	200	1	0
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	30	30	30	30	100	43	69,77
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	51	48	100	48	48	100	48
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	68	73	80	73	91,25	100	73
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	3	4	4	4	100	6	66,66

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang di atas, secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP	C	CC	CC	?	-	B	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya memiliki peranan/kontribusi dalam pencapaian target Nilai LkjiP yang telah ditentukan.

Hasil analisis belum diketahui dikarenakan belum dievaluasi oleh aparat pengawas dalam hal ini oleh inspektorat.

2. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ kota	13,85	11,11	15,38	12,5	81,27	21,54	58,03
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	64,29	32,14	64,29	42,68	66,39	64,29	66,39

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian sid 20178 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
		Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja	660	819	1095	720	65,75	1.095	65,75
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	105	74	110	71	54,64	130	56,92
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	89,83	88,90	89,86	92,63	103	89,95	103
		Jumlah kasus konflik sosial	0	1	2	0	200	1	0
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	30	30	30	30	100	43	69,77
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	51	48	100	71	71	100	48
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	70	73	80	73	91,25	100	73
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	4	4	4	4	100	6	66,66

Dalam rangka pencapaian sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang berusaha menyelesaikan kebijakan untuk mewujudkan kondisi aman, tentram dan tertib serta penegakan perda melalui pola pendekatan dan berdasarkan indikator sasaran yang ada, pencapaian ada yang mencapai 100 % .

Dari table diatas dapat di analisis pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Penegakan Perda dan Perkada

Realisasi **capaian penegakan Perda dan Perkada** pada tahun 2018 tercapai **81,27%** atau kategori **Tinggi**. Namun, capaiannya adalah 12,5% kurang dari target 15,38%.

Dari jumlah kasus pelanggaran perda yang ada yaitu 80 kasus, dapat diselesaikan dengan tindakan : tipiring sejumlah 10, pembinaan sejumlah 20, dan teguran ada 50, hal

ini kami dalam menghitungnya adalah berdasarkan jumlah kasus penegakan perda yang di tipiring yaitu sebanyak 10 dibagi 80 kasus pelanggaran perda dikalikan 100 %,

2. Prosentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Realisasi **capaian patroli siaga tibum tranmas** pada tahun 2018 tercapai **66,39%** atau kategori **sedang**. Namun, capaiannya adalah 42,68% kurang dari target 64,29%.
3. Cakupan patroli petugas Satpo PP
Realisasi **capaian patrol petugas Pol PP** pada tahun 2018 tercapai **65,75%** atau kategori **sedang**. Namun, capaiannya adalah 720 patroli kurang dari target 1.095 patroli.
4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
Realisasi **capaian rasio jumlah Pol PP** pada tahun 2018 tercapai **54,64%** atau kategori **rendah**. Namun, capaiannya adalah 71 pol PP kurang dari target 105 pol PP
5. Jumlah Satlinmas
Realisasi **capaian jumlah satlinmas** pada tahun 2018 tercapai **103%** atau kategori **sangat baik**. Namun capaiannya adalah 92,63% melebihi dari target 89,86%.
6. Jumlah kasus konflik social
Realisasi **capaian jumlah konflik sosial** pada tahun 2018 tercapai **200%** atau kategori **sangat baik**. Namun, capaiannya adalah 0 kasus dari target 2 kasus.
7. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
Realisasi **capaian pelayanan bencana kebakaran** pada tahun 2018 tercapai **100%** atau kategori **sangat baik**. Namun, capaiannya adalah 30% sesuai dari target 30%.
8. Tingkat waktu tanggap
Realisasi **capaian waktu tanggap** pada tahun 2018 tercapai **48%** atau kategori **rendah**. Namun, capaiannya adalah 48% kurang dari target 100%.
9. Prosentase aparat pemadam kebakaran yang memenuhi standart
Realisasi **capaian prosentase aparat pemadam** pada tahun 2018 tercapai **91,25%** atau kategori **sangat baik**. Namun capaiannya adalah 73% kurang dari target 80%.
10. Jumlah mobil pemadam kebakaran
Realisasi **capaian jumlah mobil pemadam kebakaran** pada tahun 2018 tercapai **100%** atau kategori **sangat baik**. Namun capaiannya adalah 4 mobil dari target 4 mobil

3.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Capaian patroli wilayah belum bisa melaksanakan 3 (tiga) kali sehari sesuai SPM hal ini karena keterbatasan aparat sdm satpol PP dan dukungan sarana prasarannya.
2. Capaian Penegakan Perda dan Perkada masih kurang optimal karena perlunya koordinasi, kerjasama dengan stakeholder lain, dan dukungan sarana prasarannya.

3. Capaian Pelayanan Bencana Kebakaran baru bisa menarget 30 % hal ini karena untuk Kabupaten Pemalang baru ada satu wilayah manajemen kebakaran, idealnya untuk Kabupaten pemalang ada 6 wilayah manajemen kebakaran untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, solusinya ada penetapan dari Pemerintah Daerah Untuk Wilayah Manajemen Kebakaran dengan di penuhi juga sarana dan prasarana kebakaran.

3.4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

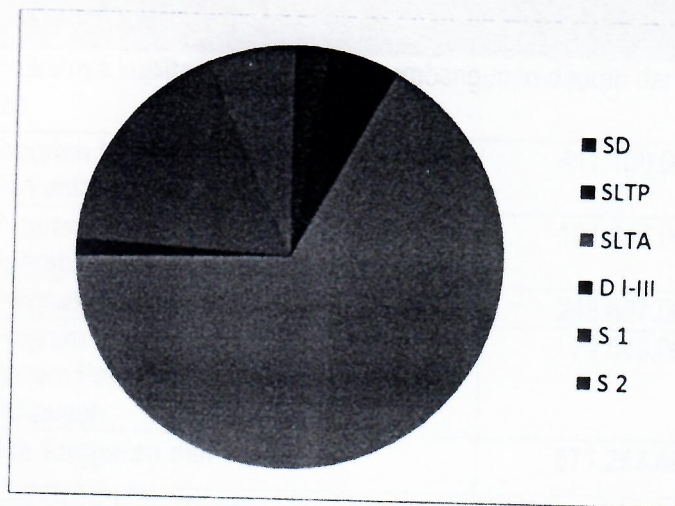
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang didukung oleh pegawai. Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pemalang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Unit/Bidang/UPTD	SD	SLTP	SLTA	D-I /II /III	DIV / S1	S2 / S3	Jumlah
1	Sekretariat	-	1	9	-	1	3	14
2	Bidang Gak Da	-	-	8	-	3	2	13
3	Bidang Tibum Tranmas	-	-	22	-	3	-	25
4	Bidang Linmas	-	-	3	1	2	-	6
5	UPT Damkar	2	2	7	-	1	-	12
	Jumlah PNS	2	3	49	1	10	5	71
6	Non PNS	-	-	74	3	15	-	92

Berdasarkan tabel diatas jumlah PNS terbanyak ada pada Bidang Tibum Tranmas yaitu sebanyak 25 personil diikuti dengan sekretariat dan bidang Penegakan Perda, sementara jumlah personil PNS sedikit ada pada bidang Linmas, dengan memperhatikan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat serta peanaan penanganan kebakaran maka dibutuhkan banyak pegawai / personil PNS, untuk mengatasi hal tersebut dengan cara merekrut tenaga kontrak, sampai dengan Tahun 2018 ada sebanyak 92 orang tenaga kontrak.

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah terbanyak adalah PNS yang berpendidikan SLTA, dengan jumlah 49 personil atau 69,02 %, urutan terbanyak kedua adalah dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 personil atau 14 %, Proporsi berdasarkan tingkat pendidikan lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut :



3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Pemalang pada tahun 2017, didukung dengan anggaran yang direncanakan

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2018, didukung dengan dana / anggaran sebesar Rp. 10.809.378.100,00 yang terbagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.283.803.000,00 dan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 5.525.575.100,00

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 10.312.978.567,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.903.500.543,00 atau 92,80 % dan belanja langsung sebesar Rp. 5.409.478.024,- atau 97,90 %

Adapun rincian belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Belanja Tahun 2018
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa lebih/kurang
Belanja Tidak Langsung	5.283.803.000	4.903.500.543	380.302.457
Belanja langsung	5.525.575.100	5.409.478.024	116.097.076
Jumlah	10.809.378.100	8.665.523.538	496.399.533

Penggunaan anggaran tersebut adalah untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang, dengan realisasi anggaran program sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis/Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah			
	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.160.000	371.085.481	90,25
	b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	131.548.000	127.182.401	96,68
	c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	248.897.000	244.726.500	98,32
	d. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	79.648.000	75.207.750	94,43
	Jumlah Anggaran dan Realisasi	871.253.000	818.202.132	93,91
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah			
	a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.614.273.500	3.579.667.265	99,04
	b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	523.099.000	522.800.774	99,94
	c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	158.651.000	153.099.500	96,50
	d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	27.505.000	27.484.000	99,92
	e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	41.685.000	41.575.000	99,74
	f. Program Darurat Bencana Kebakaran	286.108.600	266.649.353	92,23
	Jumlah Anggaran dan Realisasi	4.654.322.100	4.591.275.892	98,65

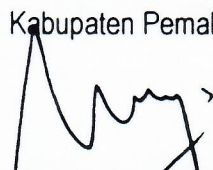
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen organisasi berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap SKPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik, LKjIP menjadi ukuran penilaian dan upaya keterlibatan publik dalam menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun sebelumnya dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Namun pencapaian kinerja program tidak selalu dapat dinilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran, sebab beberapa hal masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Oleh sebab itu evaluasi terhadap program dan kegiatan harus dilakukan secara berkala untuk dapat mengetahui pendorong keberhasilan, kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan.

Harapan kita, LKjIP ini tidak hanya berhenti menjadi dokumen laporan saja, namun harus ada rencana aksi dan upaya konkret sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kinerja. Untuk itu LKjIP harus benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik kearah yang semakin lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 untuk OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Pemalang, Januari 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pemalang

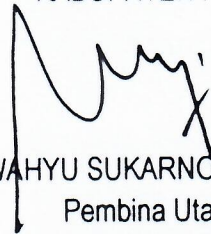

Drs. Wahyu Sukarno AP, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 19700621 199003 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	CC
2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusivitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	18,46
		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	64,29
		Cakupan patrol petugas Satuan Polisi Pamong Praja	kali	1095
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	personil	110
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Rasio	89,92
		Jumlah kasus konflik sosial	kasus	2
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten / Kota	%	43
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	menit	15-60
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 -5000 liter pada WMK	%	5

Pemalang, Januari 2018.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PEMALANG



Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, MSi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700621 199003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018 (Perubahan)**

...rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
...mentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

... : **Ir. YUNI LATIASIH, MM.**
... : **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja**
...nya disebut **Pihak Pertama**

... : **Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.**
... : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
... atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini
...rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
...encanaan.

...berhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
...kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
...sisi.

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja


Ir. YUNI LATIASIH, MM.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
SEKRETARIAT**

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
Pelayanan Administrasi				
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat terkelola dengan baik dan benar	buah	2395
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19	0
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	10
Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas	bulan	12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen penerangan bangunan yang dibutuhkan	bulan	12
Penyediaan peralatan rumah tangga		Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	paket	1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exp	264
Penyediaan makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi anggota	oh	18750
Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan		Terlaksananya rapat pendampingan kegiatan	kali	1
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS		Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi anggota non PNS	bulan	12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa AC	unit	2
Pengadaan komputer dan perlenakapannya		Tersedianya komputer dan perlenakapannya	unit	5

Kategori	Uraian	Unit	1	2
Perawatan	Perpeliharannya bangunan/gedung kantor	unit		
Perawatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	unit	19	
Perawatan	Terpeliharanya mbeler secara rutin/berkal	10	0	
Perawatan	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya secara rutin/berkala	bulan	12	
Perawatan	Tersedianya mesin absensi kantor guna meningkatkan kesiapan anggota	2	0	
Perawatan	Terpenuhi kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi anggota	stel	240	
Perawatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	buku	22	
Perawatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	4	0	
Perawatan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	buku	15	

Program	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.160.000	106.001.000	89.485.000	137.902.000	77.772.000
Penyediaan jasa surat menyurat	29.940.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.200.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56.100.000	9.900.000	9.900.000	21.300.000	15.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dan dinas/operasional	33.000.000	9.050.000	9.050.000	10.850.000	4.050.000

1.4	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.500.000	1.750.000	1.500.000	0	1.750.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	
1.6	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000	2.500.000	2.000.000	0	5.500.000	
1.7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.500.000	5.501.000	2.001.000	0	8.001.000	
1.8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
1.9	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
1.1	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.100.000	2.775.000	2.775.000	0	2.775.000	
0							
1.1	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	24.750.000	5.026.000	4.846.000	0	9.012.000	
1							
1.1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	165.500.000	37.734.000	41.418.000	0	59.379.000	
2							
1.1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	8.770.000	8.770.000	0	0	0	
3							
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	37.000.000	8.415.000	8.415.000	0	9.755.000	
4							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.548.000	18.600.000	11.400.000	0	93.648.000	
2.1	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.000.000	0	0	0	9.000.000	
2.2	Kegiatan Pengadaan komputer dan perlengkapannya	32.500.000	0	0	0	32.500.000	
2.3	Kegiatan Pengadaan peralatan kerja	27.485.000	0	0	0	27.485.000	
2.4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000	5.000.000	0	0	3.000.000	
2.5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.563.000	11.600.000	11.400.000	0	17.663.000	
2.6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
2.7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	4.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	248.897.000	198.897.000	0	0	50.000.000	
3.1	Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi	5.200.000	5.200.000	0	0	0	
3.2	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	243.697.000	193.697.000	0	0	50.000.000	

4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79.648.000	6.831.000	6.831.000	40.782.000	
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60.000.000	1.557.000	1.557.000	34.428.000	
4.2	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.500.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	
4.3	Kegiatan Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	14.148.000	3.900.000	3.900.000	4.980.000	
5	Program pemeliharaan kartrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	71.824.000	18.916.000	19.016.000	18.997.500	
5.1	Kegiatan Peningkatan kemampuan anggota satpol PP	71.824.000	18.916.000	19.016.000	18.997.500	
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	139.751.000	61.623.000	23.887.000	35.357.000	
6.1	Kegiatan Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan	139.751.000	61.623.000	23.887.000	35.357.000	
Total Anggaran		1.082.828.000	410.868.000	150.619.000	376.686.500	1

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja


Ir. YUNI LATIASHIH, MM.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

...dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
...mentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDA NUR AENY, S.E., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YUNI LATIASIH, MM.**
Jabatan : **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja**
...atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini
...dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
...rencanaan.

...kemhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
...kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
...sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Ir. YUNI LATIASIH, MM.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

IDA NUR AENY, S.E., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Triwulan		
					TW I	TW II	TW III
1	Tersusunnya buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	buku	22	20	0	0
2	Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	buku	0	4	0	0
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	buku	15	3	4	4

Pemalang, 15 Oktober 2018

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

IDA NUR AENY, S.E., M.Si.

Pihak Kedua, Pemangong Praja
Pihak Polisi

Sekretaris

Ir. YUNI LATIASIH, MM.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARDI, S IP.**
Jabatan : **Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

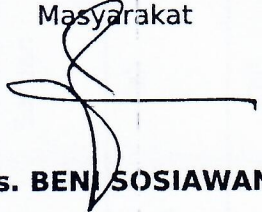
Nama : **Drs. BENI SOSIAWAN**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
Sebagai atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat


Drs. BENI SOSIAWAN

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat


HARDI, S IP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
 SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KENTENTRAMAN MASYARAKAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Triwulan		
					TW I	TW II	TW III
1	Meningkatnya keamanan di lingkungan Jalan Surohadikusumo dan Jalan Kyai Makmur	terlaksananya pengamanan hari libur di Jalan Surohadikusumo dan Jalan Kyai Makmur	kali	60	15	15	15
2	Terpeliharanya kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	terlaksananya pengamanan idul fitri, idul adha, natal dan malam tahun baru	kali	64	0	48	3
3	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan pelaksanaan kunker Pejabat	terlaksananya pengamanan kunjungan kerja pejabat	kali	36	9	9	9
4	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pengamanan aset Penda	hari	365	90	91	92
5	Meningkatnya keamanan lingkungan pada saat terjadi unjuk rasa	Jumlah pengamanan unjuk rasa	kali	12	3	3	3
6	Terciptanya kondisi daerah yang kondusif	Terpantaunya situasi daerah dan gangguan trantibum serta pelanggaran Perda dapat terdeteksi secara lebih dini dan cepat	kali	1095	270	273	276
7	Meningkatnya trantibum melalui ops anak jalanan	Jumlah anak jalanan yang terbina	orang	100	25	25	25
8	Meningkatnya trantibum melalui pembinaan KST	Jumlah KST yang terbina	kelp	30	30	0	0

		(Rp.)					
1	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	21.900.000	5.550.000	5.400.000	5.550.000		
2	Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli wilayah	208.900.000	3.750.000	75.850.000	110.000.000		
3	Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat	55.752.000	7.505.000	18.465.000	25.382.000		
4	Pengamanan Aset Pemda	246.132.000	57.633.000	53.778.000	77.500.000		
5	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	21.300.000	6.000.000	4.650.000	6.000.000		
6	Pelaksanaan patroli wilayah	327.240.000	81.810.000	81.810.000	81.810.000		
7	Penyuluhan pencegahan dan penerbitan aksi premanisme	27.505.000	6.625.000	7.185.000	7.710.000		
8	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	29.685.000	29.685.000	0	0		

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Drs. BENI SOSIAWAN

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masya

HARDI, S IP.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **#N/A**
Jabatan : **Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BENI SOSIAWAN**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
Sebagai atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat


Drs. BENI SOSIAWAN

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

#N/A

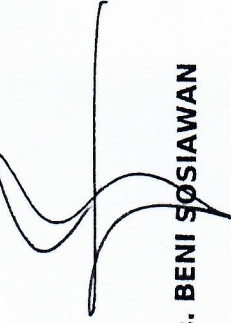
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
 SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terlaksananya operasi pemertiban guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan Perda	kali	219	54	54	53	57
meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya kondisi daerah serta tertertibnya pengaduan-pengaduan masyarakat	kali	12	3	3	3	3

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Anggaran	1.315.190.000	337.826.000	335.016.000	405.126.000	237.222.000
Realisasi	24.840.000	7.560.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000

Pemalang, 15 Oktober 2018
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



Drs. BENI SOSIAWAN

#N/A



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Untuk rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta orientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BENI SOSIAWAN**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
Kategori atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat


Drs. BENI SOSIAWAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
peningkatan keamanan dan an lingkungan				
Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat		terlaksananya pengamanan hari libur di Jalan Surohadikusumo dan Jalan Kyai Makmur	kali	60
Pengendalian keamanan lingkungan		Terlaksananya operasi penertiban guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan Perda	kali	720
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Terciptanya kondisi daerah serta tertanganinya pengaduan-pengaduan masyarakat	kali	12
Koordinasi penanganan kasus - kasus pelanggaran perda dan perpu		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan pelanggaran Perda	kali	4
Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli wilayah		terlaksananya pengamanan idul fitri, idul adha, natal dan malam tahun baru	kali	64
Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat		terlaksananya pengamanan kunjungan kerja pejabat	kali	36
Pengamanan Aset Pemda		Terlaksananya pengamanan aset Pemda	hari	365
pemeliharaan kantrantibmas dan an tindak kriminal				
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan		Jumlah pengamanan unjuk rasa	kali	12
Pelaksanaan patroli wilayah		Terpantaunya situasi daerah dan gangguan trantibum serta pelanggaran Perda dapat terdeteksi secara lebih dini dan cepat	kali	1095
emberdayaan masyarakat untuk tertiban dan keamanan				
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		Jumlah KST yang terbina	kelp	30

No	Program	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.028.434.000	443.484.000	549.649.000	675.088.000	
1.1	Kegiatan Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	21.900.000	5.550.000	5.400.000	5.550.000	
1.2	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	1.315.190.000	337.826.000	335.016.000	405.126.000	
1.3	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	24.840.000	7.560.000	5.760.000	5.760.000	
1.4	Kegiatan Koordinasi penanganan kasus - kasus pelanggaran perda dan perpu	155.720.000	23.660.000	55.380.000	45.770.000	
1.5	Kegiatan Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli wilayah	208.900.000	3.750.000	75.850.000	110.000.000	
1.6	Kegiatan Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat	55.752.000	7.505.000	18.465.000	25.382.000	
1.7	Kegiatan Pengamanan Aset Pemda	246.132.000	57.633.000	53.778.000	77.500.000	
2	Program pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak Kriminal	348.540.000	87.810.000	86.460.000	87.810.000	
2.1	Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	21.300.000	6.000.000	4.650.000	6.000.000	
2.2	Kegiatan Pelaksanaan patroli wilayah	327.240.000	81.810.000	81.810.000	81.810.000	
3	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	27.505.000	6.625.000	7.185.000	7.710.000	
3.1	Kegiatan Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	27.505.000	6.625.000	7.185.000	7.710.000	
4	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	29.685.000	29.685.000	0	0	
4.1	Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	29.685.000	29.685.000	0	0	
Total Anggaran		2.434.164.000	567.604.000	643.294.000	770.608.000	45

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.



Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Drs. BENI SOSIAWAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape followed by a horizontal line, located below the name Drs. Beni Sosiawan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI SUBYAKTO, SH., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah


SRI SUBYAKTO, SH., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG PENEKAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Operasi penegakan perda dan perundang-undangan	Jumlah pemantauan barang kena cukai ilegal	kali	192
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI dan kejaksaan		Jumlah kegiatan penanganan pelanggaran Perda	kali	36
Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan				

Program	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
Peningkatan keamanan dan kenyamanan	500.000.000	0	259.635.000	240.365.000	0
Operasi penegakan perda dan perundang-undangan	500.000.000	0	259.635.000	240.365.000	0
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan kriminal	60.855.000	18.825.000	12.445.000	18.445.000	11.140.000
Kerjasama pengembangan kemampuan polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan lainnya	60.855.000	18.825.000	12.445.000	18.445.000	11.140.000
Pengembangan wawasan kebangsaan	18.900.000	3.350.000	6.100.000	3.350.000	6.100.000
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa	18.900.000	3.350.000	6.100.000	3.350.000	6.100.000
Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	12.000.000	0	12.000.000	0	0

Total Anggaran	591.755.000	22.175.000	12.000.000	0	12.000.000	0	262.160.000	0	17.240.000
----------------	-------------	------------	------------	---	------------	---	-------------	---	------------

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018 (Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERY WIBOWO, SH.**
Jabatan : **Kepala Seksi Penindakan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SRI SUBYAKTO, SH., M.SI.**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. **Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan/sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
SRI SUBYAKTO, SH., M.SI.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penindakan
ERY WIBOWO, SH.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan),
 BIDANG PENEKAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
 SEKSI PENINDAKAN**


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Triwulan		
					TW I	TW II	TW III
1	Meningkatnya pemantauan barang kena cukai ilegal	Jumlah pemantauan barang kena cukai ilegal	kali	192	48	48	48
2	Meningkatnya koordinasi penanganan pelanggaran Perda	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan pelanggaran Perda	kali	4	1	1	1
3	Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Perda	Jumlah kegiatan penanganan pelanggaran Perda	kali	36	9	9	9

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III
1	Operasi penegakan perda dan perundang-undangan	500.000.000	0	259.635.000	240.365.000
2	Koordinasi penanganan kasus - kasus pelanggaran perda dan perpu	155.720.000	23.660.000	55.380.000	45.770.000
3	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksanaan	60.855.000	18.825.000	12.445.000	18.445.000

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah


SRI SUBYAKTO, SH., M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Penindakan


ERY WIBOWO, SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUYUT SURANTORO, SH.**
Jabatan : **Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SRI SUBYAKTO, SH., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah


SRI SUBYAKTO, SH., M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan


SUYUT SURANTORO, SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. RUGITO**
Jabatan : **Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MISBAHUDIN, S.IP.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini
yang akan mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

MISBAHUDIN, S.IP.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Drs. RUGITO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan		
					TW I	TW II	TW
1	Tertindakannya upacara gelar pasukan HUT linmas, pembinaan tingkat Provinsi dan PAM Idul Fitri serta PAM Pilgub	Tertindakannya gelar pasukan HUT Linmas, pembinaan tingkat Provinsi, PAM Idul Fitri dan PAM Pilgub	kali	3	1	1	1
2	Tertindakannya pelatihan tenaga linmas	Tertatihnya tenaga linmas	orang	100	0	100	0
3	Meningkatnya kemampuan anggota linmas	Tertatihnya anggota linmas	orang	106	0	106	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.015.508.500	95.168.500	413.040.000	506.500.000
2	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	37.841.000	0	37.841.000	0
3	Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	32.490.000	18.430.000	14.060.000	0

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat



Pemalang, 15 Oktober 2018
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat





2



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018 (Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MISBAHUDIN, S.IP.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat


MISBAHUDIN, S.IP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
Keamanan dan kenyamanan lingkungan				
Pemberdayaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		Terlaksananya gelar pasukan HUT Linmas, pembinaan tingkat Provinsi, PAM Idul Fitri dan PAM Pilgub	kali	3
Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		Terlatihnya tenaga linmas	orang	100
Pemberdayaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		Terlatihnya anggota linmas	orang	106
Peningkatan sarana prasarana dan sarana hukum dan penegakan hukum				
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarta di tingkat kabupaten/kota		Jumlah anggota yang terlatih dalam Peraturan Baris Berbaris dsb	orang	1200

Program	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
Keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.085.839.500	113.598.500	464.941.000	506.500.000	800.000
Pemberdayaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.015.508.500	95.168.500	413.040.000	506.500.000	800.000
Peningkatan sarana prasarana dan sarana hukum dan penegakan hukum	37.841.000	0	37.841.000	0	0
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarta di tingkat kabupaten/kota	32.490.000	18.430.000	14.060.000	0	0
Peningkatan sarana prasarana dan sarana hukum dan penegakan hukum	41.880.000	9.965.000	11.080.000	9.755.000	11.080.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarta di daerah	41.880.000	9.965.000	11.080.000	9.755.000	11.080.000

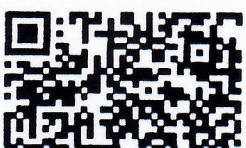
1.127.719.500	123.563.500	476.021.000	516.255.000	11.880.000
---------------	-------------	-------------	-------------	------------

Pemalang, 15 Oktober 2018
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Pihak Kedua,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

MISBAHUDIN, S.IP.

DTS. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : #N/A
Jabatan : **Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MISBAHUDIN, S.IP.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat


MISBAHUDIN, S.IP.

#N/A

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)
 BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT**

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
kemampuan	Jumlah anggota yang terlatih dalam Peraturan Baris Berbaris dsb	orang	1200	300	300	300	300

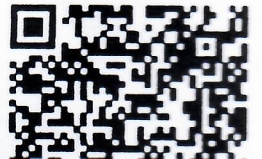
Kategori Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kapasitas aparat dalam rangka skamswakarsa di daerah	41.880.000	9.965.000	11.080.000	9.755.000	11.080.000

Pemalang, 15 Oktober 2018
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

MISBAHUDIN, S.IP.

#N/A





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Perubahan)

Am rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta orientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ma : **MISBAHUDIN, S.IP.**
atan : **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat**
anjutnya disebut **Pihak Pertama**

ma : **Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.SI.**
atan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
aku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini am rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencanaan.

berhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian erja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan ksi.

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.SI.

Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

MISBAHUDIN, S.IP.

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. WAHYU SUKARNO ADIPRAYITNO, M.Si.



Pemalang, 15 Oktober 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

MISBAH UDIN, S.I.P.

